

Reshuffle dan Komunikasi Politik Menteri

Narifantara,

Dosen Universitas Sangga Buana Bandung

Rencana reshuffle Kabinet Kerja Jilid II yang berarus-larut menyebabkan konstelasi politik tidak menentu. Sebelum melakukan reshuffle kabinet Jilid II Presiden Jokowi telah memisahkan pentingnya politik kerja bagi sebagian anggota kabinet dan pejabat negara. Politik kerja menjauhkan diri dari wacana dan membutuhkan kerja detail serta sinergitas yang berdasarkan jiwa kebangsaan gotong royong.

Reshuffle Jilid II juga untuk meredakan timbulnya turbulensi komunikasi kabinet akibat beda pendapat yang terdapat terkait program atau proyek. Setelah reshuffle Jilid II komunikasi politik para menteri harus lebih cerdas. Selain itu tidak boleh terjadi gangguan relasional antara media masa dengan Kementerian.

Kandungan informasi yang diberikan oleh media Kementerian sebaiknya tidak sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat sang menteri dalam framing kerap cap jempol, tetapi harus juga diimbangi dengan framing yang menjadi masalah pelik yang sebenarnya. Santiayo Humas Kementerian menjelaskan secara mendalam suatu kebijakan atau peristiwa yang terjadi dan sudah diberitakan ke publiknya oleh media. Kasus reklamasi Teluk Jakarta yang menimbulkan persepsi publik merupakan salah satu contoh bahwa Kementerian terkait lambat memberikan penjelasan mendalam.

Yang harus selalu diawasi para menteri adalah kemampuan untuk merejele-mahkan dan meneglabornasi visi dan gagasan-gagasan Presiden. Meneglabornasi visi, ide dan kebijakan Presiden, kemudian mengkomunikasikannya kepada rakyat luas untuk periode saat ini memang sangat pelik. Namun bisa lebih pelik lagi dari sini kepentingan rakyat luas, jika menteri terperosok untuk mengeluarkan pejabat lain yang mementiri pernyataan Presiden.

Gaya komunikasi para menteri diharapkan tidak bersifat liberal, tetapi harus semantika menekankan nilai tradisi Indonesia yang telah membumi berabad-abad, yakni gotong royong agar energi kolektif kebangsaan untuk bergotong royong bisa terakumulasi dengan baik untuk budaya persatuan global.

Para menteri harus memiliki karakter

with the talk atau satunya kata dengan perbuatan. Karakter tersebut akan memengaruhi jiwa gotong royong dalam Kabinet Kerja. Gotong royong merupakan pembangunan tanpa pamrih, pemertan berhitung bersama, perjuangan bantam-bantam bersama.

Publik berharap harap semua menteri reshuffle kabinet Jilid II. Apakah sosok menteri seperti Rizal Ramli yang selama ini diasingi takang bisa gabung rasah dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Selama ini sebenarnya Rizal Ramli yang berlatar belakang aktivis LSM dan intelektual publik memberikan pencerahan kepada publik terkait kebijakan pemerintah yang sangat penting untuk masa depan. Kegaduhan yang ditimbulkan adalah kegaduhan yang substansial dan esensial yang perlu diketahui dan dipahami oleh rakyat luas.

Kegaduhan tak selalu negatif

Mindaya terkait dengan pilihan teknologi terhadap pengelolaan megaprojek nugas Blok Masela. Dalam kaitan di atas, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal

Ramli membangun industri petudi dan peternakan. Indonesia bisa dapat sekitar 138 8,5 miliar tiap tahun. Nilai tambahnya lebih dari dua kali lipat dibanding ekspor LNG. Kalau ekspor berada di luar kelas itu multiplier effect yang akan dihasilkan lebih luas dengan skema offshore karena bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja nasional.

Tidak selamanya kegaduhan itu berarti negatif, namun juga bisa menimbulkan persepsi publik. Oleh sebab itu rakyat masih berharap agar Presiden Jokowi masih mempertahankan sosok Rizal Ramli sebagai pembantu. Karena rakyat menilai, Rizal Ramli adalah menteri yang berkehal seperti ahli sehingga bisa lebih cepat dan lebih detail. Hal itu terbukti dengan keberhasilannya yang memperbaiki *deadline time* atau waktu bongkar muat dan pengurusan di pelabuhan menjadi lebih singkat selama dengan segera tetangga.

Dalam hal masalah ekonomi, Rizal Ramli memiliki ideologi dan teori yang dipadukan paham Triasakti yang digantikan oleh Bung Karno serta Nawa Cita yang diusung oleh Presiden Jokowi. Ter-

sebut Rizal Ramli tersebut menyatakan bahwa selama ini terjadi struktur ekonomi gelas anggur yang merupakan hasil kegiatan ekonomi Orde dan baby Orde selama 40 tahun terakhir. Di bagian atas gelas anggur dikurangi oleh kelompok bisnis besar dan BUMN yang tidak efisien dan kebanyakan juga kanvas sehingga sering menjadi beban atau *liability* negara.

Pegangan gelas anggur tersebut sangat tipis, yang mengakibatkan keclanya golongan menengah dan usaha skala menengah yang independen. Bagian bawah dari gelas anggur tersebut sangat besar yang menunjukkan

jumlah juta usaha kecil dan ekonomi rakyat. Negara selama ini selalu memajukan bagian atas dari gelas anggur dan mengabaikan lapisan bawah, yang struktur ekonominya super-kompetitif dan margin kesantungannya sangat tipis. Struktur gelas anggur yang sangat timpang tersebut sangat tidak adil.

Struktur yang sangat tidak adil tersebut harus diubah menjadi struktur piramida. Indonesia memerlukan usaha skala besar tetapi bukan selodur jago kandang tetapi juga jago dunia, yang kompetitif di dunia internasional dan mampu membawa nilai tambah di pasar internasional ke dalam negeri. Transformasi dari jago kandang menjadi jago dunia memerlukan ketajaman yang kuhores.



Ramli "ngotot" menggunakan skema pengelolaan kilang gas di darat atau *onshore*. Hal itu bertolak belakang dengan Menteri ESDM yang juga "ngotot" menggunakan skema *offshore*, yakni kilang gas di laut.

Setelah terjadi dinamika perbedaan pendapat yang oleh lawan politik disebut sebagai kegaduhan, maka Presiden Jokowi memutuskan skema *onshore* karena aspek sumber daya alam migas tidak hanya digunakan untuk sumber devisa semata, tapi juga harus memiliki industri turunan dan manfaat lainnya. Karena skema *offshore* atau kilang terapung di laut hanya akan memberikan sumber devisa sebesar USD 2,02 miliar tiap tahun. Tapi, dengan skema *onshore*, pemerintah